



# KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Radar Bangka
- Babel News
- Rakyat Pos
- Lainnya : \_\_\_\_\_

Tanggal:

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	2
																						0
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		7	8	9	10	11	12	1
																						9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

## Uang Komite Belum Tertib

INSPEKTUR Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanto mengatakan, berdasarkan hasil masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada permasalahan terkait pengelolaan iuran pelaksanaan pendidikan (IPP) atau uang komite.

"Temuan BPK yang disampaikan ke kami, pengelolaan dana IPP banyak yang belum tertib. Padahal, ada peraturan gubernur untuk pembukuan dan pelaporan IPP. Inspektorat tahun ini melakukan pemeriksaan keseluruhan IPP, APBN, APBD," kata Susanto dalam pertemuan membahas penatausahaan keuangan di lingkungan dinas pendidikan, di rumah dinas Gubernur Babel, Kamis (2/5).

Selain itu, lanjut dia, uang persediaan di sejumlah sekolah juga tidak tertib. Padahal, penggunaan uang itu harus dicatat.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel Muhammad Soleh meminta kepala sekolah mencermati hal tersebut. Sebab, apabila ada satuan pendidikan yang

bermasalah maka akan berdampak pada laporan dan opini keuangan dinas pendidikan hingga pemerintah provinsi.

"Pertanggungjawaban keuangan di Pemprov yang penyelesaian paling kompleks itu di OPD kita, karena banyak satuan pendidikan mulai dari cabdin (cadang dinas), satuan pendidikan. Kalau satu sekolah bermasalah, OPD dinas pendidikan bermasalah, kalau dinas pendidikan bermasalah nanti satu Pemprov bermasalah," kata Soleh.

Saat ini, lanjut dia, bendahara sudah diberikan bimbingan teknis tentang pelaporan keuangan. "Permasalahan kita jangan sampai tahun ke depan terulang kembali, OPD kita terulang. Kepala sekolah ini tanggung jawab kita semua sehingga harus benar. Apalagi sekolah yang berulang, baik itu IPP, bantuan pemerintah BOS (bantuan operasional sekolah) APBN dan BOSDA dirapikan dan dicek langsung. Jangan sampai permasalahan ini berulang," tuturnya. (o2)